LAMPIRAN IA
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 176/PMK.06/2010 TENTANG
BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh Pemberian Izin Operasional Balai Lelang

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /KM.06/20..

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PT BALAI LELANG ...

(NPWP : ...)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa Saudara ..., Direktur/Direktur Utama PT Balai Lelang ... dengan surat Nomor: ... tanggal ... mengajukan permohonan izin operasional Balai Lelang;

b. bahwa PT Balai Lelang ... telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.06/20.. tentang Balai Lelang sehingga dapat diberikan izin operasional Balai Lelang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pemberian Izin Operasional PT Balai Lelang.....;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.06/20.. tentang Balai Lelang;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PT BALAI LELANG ... (NPWP : ...).

PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Balai Lelang kepada PT Balai Lelang ... (NPWP : ...) yang berkedudukan di .... dengan alamat ..., sesuai dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor ... tanggal ... yang dibuat oleh Notaris ..., yang telah disahkan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: ... tanggal ...

KEDUA : Ruang lingkup usaha PT Balai Lelang ... adalah terbatas pada kegiatan jasa pralelang dan jasa pascalelang untuk semua jenis lelang serta sebagai kuasa pemilik barang dapat bertindak selaku pemohon lelang atau penjual hanya untuk Lelang Noneksekusi Sukarela yaitu lelang barang milik BUMN/D berbentuk Persero; lelang harta milik bank dalam likuidasi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan dan lelang barang milik swasta, perseorangan atau badan hukum/badan usaha, yang sudah dapat dilakukan terhitung sejak terbitnya Keputusan Menteri Keuangan ini.

KETIGA : Apabila dalam melaksanakan kegiatan usahanya Balai Lelang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan lelang yang berlaku akan dicabut Izin Operasionalnya.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

(Tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN TU. DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN IB
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG
BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh Pencabutan Izin Operasional Balai Lelang

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /KM.06/20..

TENTANG

PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL
PT BALAI LELANG ...
(NPWP : ...)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap PT Balai Lelang ... yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.06/20.. tentang Balai Lelang;

b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti pendukung PT Balai Lelang ... telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.06/20.. tentang Balai Lelang, yang dapat menyebabkan pencabutan izin operasional Balai Lelang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pencabutan Izin Operasional PT Balai Lelang ...;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.06/20.. tentang Balai Lelang;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PECABUTAN IZIN OPERASIONAL PT BALAI LELANG ... (NPWP : ...).

PERTAMA : Mencabut Izin Operasional PT Balai Lelang ... (NPWP: ...) yang berkedudukan di ... dengan alamat ..., yang melakukan kegiatan usaha sesuai Izin Operasional PT Balai Lelang ... Nomor .../KM.06/20.. tentang Pemberian Izin Operasional PT Balai Lelang ...

KEDUA : PT Balai Lelang ... yang telah dicabut izin operasionalnya dilarang melakukan kegiatan usaha balai lelang, melakukan pengalihan kepemilikan pemegang saham, melakukan perubahan pengurus dan melakukan perubahan manajemen.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

(Tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN TU DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 176/PMK.06/2010 TENTANG
BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh Surat Permohonan Izin Operasional Balai Lelang

Jakarta, ...

Nomor : (sesuai Nomor korespondensi Balai Lelang)
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Operasional
PT Balai Lelang ...

Yth. Direktur Jenderal Kekayaan Negara
Gedung Syafrudin Prawiranegara, Lantai 12.
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2 - 4
Jakarta Pusat

Menunjuk Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.06/20.. tentang Balai Lelang, dengan ini kami mengajukan Permohonan Izin Operasional PT Balai Lelang ...

Adapun persyaratan yang kami lampirkan adalah sebagai berikut:

1. akta Pendirian PT Balai Lelang ..., yang dibuat di hadapan Notaris dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
2. bukti modal disetor sekurang-kurangnya Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
3. rekening koran atas nama PT Balai Lelang ...;
4. proposal pendirian PT Balai Lelang ..., yang memuat antara lain:
   a. ruang lingkup kegiatan Balai Lelang;
   b. struktur organisasi berikut personil, termasuk tenaga penilai, tenaga hukum (apabila tenaga penilai dan tenaga hukum bekerja sebagai karyawan Balai Lelang yang bersangkutan); dan
   c. rencana kegiatan lelang selama 1 (satu) tahun;
5. neraca awal PT Balai Lelang ...;
6. sertifikat atau surat tanda bukti kepemilikan atau surat perjanjian sewa dengan jangka waktu sewa minimal 2 (dua) tahun dan foto sebagai data pendukung tersedianya fasilitas:
   a. kantor dengan luas sekurang-kurangnya 60 m^2;
   b. gudang/tempat penyimpanan barang dengan luas sekurang-kurangnya 100 m^2;
7. fotokopi identitas para pemegang saham dan direksi Balai Lelang;
8. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PT Balai Lelang ..., para pemegang saham dan direksi;
9. Surat Pernyataan dari para pemegang saham dan direksi PT Balai Lelang ..., bahwa yang bersangkutan tidak memiliki kredit macet di bank pemerintah/swasta dan tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela (DOT);
10. Surat Keterangan Domisili kantor PT Balai Lelang ... dari kelurahan setempat;

11. Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atau surat izin/keterangan sejenis yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
12. bukti tersedianya tenaga penilai berupa ijazah/sertifikat penilai dan surat perjanjian kerja (apabila tenaga penilai yang bersangkutan berasal dari luar Balai Lelang); dan
13. bukti tersedianya tenaga hukum berupa ijazah sarjana hukum dan surat perjanjian kerja (apabila tenaga hukum yang bersangkutan berasal dari luar Balai Lelang).

Demikian permohonan kami, atas perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT Balai Lelang ...

Materai

.....
Jabatan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 176/PMK.06/2010 TENTANG
BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Kredit Macet Pada Bank Pemerintah Atau Swasta dan Tidak Termasuk Dalam Daftar Orang Tercela

---

SURAT PERNYATAAN
TIDAK MEMPUNYAI KREDIT MACET PADA BANK PEMERINTAH ATAU SWASTA DAN TIDAK TERMASUK DALAM DAFTAR ORANG TERCELA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa saya baik atas nama pribadi maupun atas nama perusahaan tidak mempunyai kewajiban dan atau kredit macet kepada Bank Pemerintah atau Bank Swasta.
2. Bahwa saya tidak termasuk dalam Daftar Orang Tercela.
3. Bahwa apabila dikemudian hari surat pernyataan yang kami buat tidak benar, maka kami sebagai pengurus PT Balai Lelang ... menyatakan bersedia untuk dicabut izin operasional perusahaan lelang tersebut, tanpa melalui peringatan dan tanpa melalui proses eksekusi pengadilan.
4. Bahwa saya tidak akan menggugat Kementerian Keuangan RI cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sehubungan dengan pencabutan izin operasional balai lelang tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ...

Hormat kami,

Materai

.....
Jabatan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

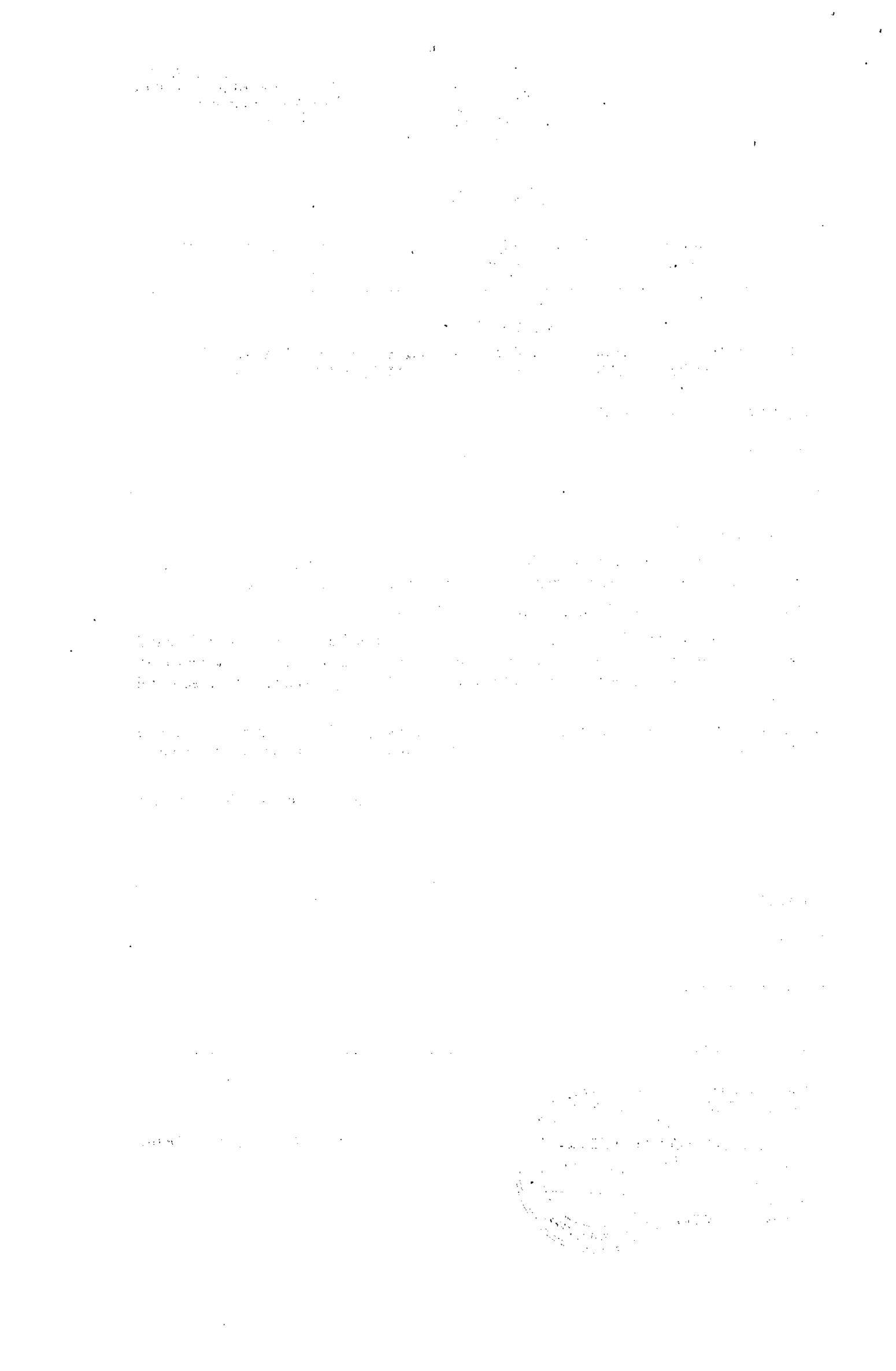

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG
BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh Pemberian Izin Pindah Tempat Kedudukan Balai Lelang

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR KEP- /KN/20..

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PINDAH TEMPAT KEDUDUKAN
PT BALAI LELANG ... (NPWP: ...)

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa Saudara ..., Direktur Utama PT Balai Lelang ... dengan surat Nomor: ... tanggal ... mengajukan permohonan izin pindah tempat kedudukan Balai Lelang;

b. bahwa PT Balai Lelang ... telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.06/20.. tentang Balai Lelang, sehingga dapat diberikan izin pindah tempat kedudukan Balai lelang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pemberian Izin Pindah Tempat Kedudukan PT Balai Lelang ...;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.06/20.. tentang Balai Lelang;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PEMBERIAN IZIN PINDAH TEMPAT KEDUDUKAN PT BALAI LELANG ....

PERTAMA : Memberikan izin pindah tempat kedudukan kepada PT Balai Lelang ..., (NPWP: ..), semula berkedudukan di:

(tempat kedudukan yang lama)

menjadi,

(tempat kedudukan yang baru).

KEDUA : PT Balai Lelang ... setelah mendapat izin pindah tempat kedudukan wajib memberitahukan kepada khalayak umum melalui surat kabar harian setempat paling lama 5 (lima) hari kerja setelah izin diberikan dan menyampaikan bukti pengumuman kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala Kantor Wilayah setempat atau Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan yang lama dan/atau Kepala Kantor Wilayah tempat kedudukan yang baru, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diumumkan.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini disampaikan kepada:

1. Direktur Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
2. Kepala Kantor Wilayah ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

(Tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN TU. DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG
BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh Pemberian Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Balai Lelang

---

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR KEP- /KN/20..

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR PERWAKILAN
PT BALAI LELANG ... (NPWP: ...)

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa Saudara ..., selaku Direktur PT Balai Lelang ... dengan surat Nomor: ... tanggal ... mengajukan permohonan izin pembukaan kantor perwakilan Balai Lelang;

b. bahwa PT Balai Lelang ... telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.06/20.. tentang Balai Lelang, sehingga dapat diberikan izin pembukaan kantor perwakilan Balai Lelang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pemberian Izin Pembukaan Kantor Perwakilan PT Balai Lelang ...;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.06/20.. tentang Balai Lelang;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PEMBERIAN IZIN PEMBUKAAN KANTOR PERWAKILAN PT BALAI LELANG ... (NPWP: ...).

PERTAMA : Memberikan izin pembukaan kantor perwakilan kepada PT Balai Lelang ... (NPWP: ...) yang berkedudukan di ... dengan alamat di ...;

KEDUA : Kantor Perwakilan PT Balai Lelang ... bukan merupakan badan hukum tersendiri sehingga Direksi PT Balai Lelang ... bertanggungjawab penuh terhadap kegiatan kantor perwakilan.

KETIGA : Dalam melakukan kegiatan usahanya, pimpinan Kantor Perwakilan bertindak untuk dan atas nama Direksi PT Balai Lelang ...

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini disampaikan kepada:

1. Direktur Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
2. Kepala Kantor Wilayah ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

(Tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG
BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh Pemberian Izin Perubahan Pemegang Saham

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
NOMOR KEP- /KN/20..

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM
PT BALAI LELANG ... (NPWP : ...)

DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

Menimbang :

a. bahwa Saudara ..., Direktur Utama PT Balai Lelang ... dengan surat Nomor: ... tanggal ... mengajukan permohonan izin perubahan pemegang saham Balai Lelang;

b. bahwa PT Balai Lelang ... telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.06/20.. tentang Balai Lelang, sehingga dapat diberikan izin perubahan pemegang saham Balai Lelang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara tentang Pemberian Izin Perubahan Pemegang Saham PT Balai Lelang ...;

Mengingat :

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor ... /PMK.06/20.. tentang Balai Lelang;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA TENTANG PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN PEMEGANG SAHAM PT BALAI LELANG ... (NPWP : ...).

PERTAMA : Memberikan izin perubahan pemegang saham kepada PT Balai Lelang ... (NPWP : ...) semula terdiri:
Pemegang Saham Lama:

... sebanyak ... saham
... sebanyak ... saham
menjadi,
Pemegang Saham Baru:
... sebanyak ... saham
... sebanyak ... saham.

KEDUA : PT Balai Lelang ... yang telah memperoleh izin perubahan pemegang saham, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terjadinya pengesahan perubahan pemegang saham wajib menyampaikan dokumen akta perubahan pemegang saham PT Balai Lelang ... dan Surat Keterangan atau Pengesahan dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perubahan pemegang saham Balai Lelang, kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Negara ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Wilayah ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAN NEGARA,

(Tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN TU. DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 176/PMK.06/2010 TENTANG
BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh Pembekuan Izin Operasional Balai Lelang

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR /KM.06/20..

TENTANG

PEMBEKUAN IZIN OPERASIONAL
PT BALAI LELANG ...

(NPWP : ...)

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara .... Nomor: .../KW.../... tanggal ... telah terjadi pelanggaran Pasal .... Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.06/20.. tentang Balai Lelang, oleh PT Balai Lelang ...;

b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti-bukti pendukung PT Balai Lelang ... telah terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Pasal ... Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.06/20.. tentang Balai Lelang, yang dapat menyebabkan pembekuan izin operasional Balai Lelang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembekuan Izin Operasional PT Balai Lelang ...;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK.06/20.. tentang Balai Lelang;

2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 347/KMK.01/2008 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 218/KMK.01/2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEKUAN IZIN OPERASIONAL PT BALAI LELANG ... (NPWP : ...).

PERTAMA : Membekukan Izin Operasional PT Balai Lelang ... (NPWP : ...), berkedudukan di ... dengan alamat ..., yang melakukan kegiatan usaha sesuai Izin Operasional PT Balai Lelang ... Nomor .../KM.06/20.. tentang Pemberian Izin Operasional PT Balai Lelang ...

KEDUA : PT Balai Lelang ... yang telah dibekukan izin operasionalnya harus menyelesaikan kewajiban yang terkait dengan pembekuan izin operasional Balai Lelang dan dilarang melakukan kegiatan usaha balai lelang, melakukan pengalihan kepemilikan pemegang saham, melakukan perubahan pengurus dan melakukan perubahan manajemen.

KETIGA : Pembekuan izin operasional Balai Lelang ini berakhir, apabila PT Balai Lelang ... telah menyelesaikan kewajibannya yang terkait dengan pembekuan izin operasional Balai Lelang, atau dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan Menteri Keuangan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Lelang, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
5. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kantor Wilayah ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ..., Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
a.n. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA,

(Tanda tangan dan cap jabatan)

NAMA LENGKAP
NIP

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG
BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh Buku Register Permintaan Lelang

BUKU REGISTER PERMINTAAN LELANG

PT BALAI LELANG ...

Bulan ... Tahun ...

Nomor Urut Register	Nomor dan Tanggal Surat Permintaan Lelang	Pemilik Barang	Tempat Lelang	Sifat Barang	Tanggal dan Alasan Pembatalan Lelang	Nomor Risalah Lelang	Nama Pejabat Lelang dan/atau KPKNL	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9

BUKU REGISTER PERMINTAAN LELANG

Buku Register Permintaan Lelang Balai Lelang merupakan buku permintaan lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang setiap bulan.

CARA PENGISIAN:

Judul diisi Buku Register Permintaan Lelang Balai Lelang yang bersangkutan dan Bulan dan Tahun buku dibuat.

Kolom	Cara Pengisian	Keterangan
1	*2*	*3*
1.	Diisi nomor urut	
2.	Diisi nomor dan tanggal surat permintaan lelang	
3.	Diisi nama/identitas pemilik barang	
4.	Diisi tempat lelang	
5.	Diisi sifat barang yang akan dilelang	
6.	Diisi tanggal dan alasan pembatalan lelang	
7.	Diisi nomor Risalah Lelang	
8.	Diisi nama Pejabat Lelang dan KPKNL tempat kedudukannya	
9.	Diisi keterangan lain/tambahan apabila ada	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN TU. DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001

MENTERI KEUANGAN
ttd.
AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG
BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh Buku Kegiatan Pralelang dan Pascalelang

BUKU KEGIATAN PRALELANG DAN PASCALELANG

PT BALAI LELANG ...

Bulan ... Tahun ...

No.	Lelang		Pemohon	Jenis Lelang	Pelaksana Lelang	Barang yang Dilelang	
	Tanggal	Tempat				Jenis	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8

BUKU KEGIATAN PRA LELANG DAN PASCA LELANG

Buku Kegiatan Pralelang dan Pascalelang merupakan buku yang berisi catatan kegiatan pra lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang setiap bulan.

CARA PENGISIAN:

Judul diisi Buku Kegiatan Pralelang dan Pascalelang Balai Lelang yang bersangkutan dan Bulan dan Tahun buku dibuat.

Kolom	Cara Pengisian	Keterangan
1	2	3
1.	Diisi nomor urut	
2.	Diisi tanggal pelaksanaanlelang	
3.	Diisi tempat pelaksanaan lelang	
4.	Diisi pemohon lelang	
5.	Diisi jenis lelang	
6.	Diisi nama KPKNL pelaksana lelang	
7.	Diisi jenis barang yang dilelang	
8.	Diisi jumlah barang yang dilelang	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG
BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh Buku Penerimaan dan Penyerahaan Barang

BUKU PENERIMAAN DAN PENYERAHAAN BARANG

PT BALAI LELANG ...

Bulan ... Tahun ...

No.	Barang Yang Diterima Bulan Ini		Nama dan Alamat Pemilik Barang	Risalah Lelang		Penyerahan Barang Kepada Pemenang Lelang		Sisa Barang Yang Diterima s/d Bulan ini		Ket
	Jenis	Jumlah		Tanggal	Nomor	Tanggal	Nomor Bukti	Jenis	Jumlah	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Jumlah							Jumlah		

BUKU PENERIMAAN DAN PENYERAHAN BARANG

Buku Penerimaan dan Penyerahan Barang merupakan buku yang berisi catatan permintaan lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang setiap bulan.

CARA PENGISIAN :

Judul diisi Buku Register Permintaan Lelang Balai Lelang yang bersangkutan dan Bulan dan Tahun Laporan dibuat.

Kolom	Cara Pengisian	Keterangan
1	2	3
1.	Diisi nomor urut	
2.	Diisi jenis barang yang diterima pada bulan ini	
3.	Diisi jumlah barang yang diterima pada bulan ini	
4.	Diisi nama dan alamat pemilik barang	
5.	Diisi tanggal Risalah Lelang	
6.	Diisi nomor Risalah Lelang	
7.	Diisi tanggal penyerahan barang kepada Pemenang Lelang	
8.	Diisi nomor bukti penyerahan barang kepada Pemenang Lelang	
9.	Diisi jenis sisa barang yang diterima sampai dengan bulan ini	
10.	Diisi jumlah sisa barang yang diterima sampai dengan bulan ini	
11.	Diisi keterangan lain/tambahan apabila ada	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN TU. DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG
BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh Buku Penerimaan dan Penyetoran Harga Lelang

BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN HARGA LELANG

PT BALAI LELANG ...

Bulan ... Tahun ...

No. Urut	No & Tgl RL	Uraian Penerimaan	Tanggal Penerimaan & No. Buki	Harga Lelang		Bea Lelang	Uang Jaminan Lelang	Lain-lain	Jumlah
				Hasil Lelang	PPh				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jumlah Penerimaan :									

No. Urut	No & Tgl RL	Uraian Pengeluaran	Harga Lelang			Tgl Setor & No. Bukti	Bea Lelang	Tgl Setor & No. Bukti	Uang Jaminan Lelang	Tgl Setor & No. Bukti	Lain-lain	Jumlah
			Hasil Lelang	Tgl Setor & No. Bukti	PPh							
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Jumlah Pengeluaran :												

BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN HARGA LELANG

Buku Penerimaan dan Penyetoran Harga Lelang merupakan buku yang berisi catatan kegiatan penerimaan dan penyetoran harga lelang atas lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang setiap bulan.

CARA PENGISIAN:

Judul diisi buku kegiatan penerimaan dan penyetoran harga lelang atas lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang yang bersangkutan serta Bulan dan Tahun buku dibuat.

Kolom	Cara Pengisian	Keterangan
1	2	*3*
1.	Diisi nomor urut	
2.	Diisi nomor dan tanggal Risalah Lelang	
3.	Diisi uraian penerimaan	
4.	Diisi tanggal dan nomor bukti penerimaan	
5.	Diisi jumlah bagian hasil lelang yang dipotong untuk pembayaran PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	
6.	Diisi jumlah PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan yang disetorkan	
7.	Diisi jumlah Bea Lelang yang disetorkan	
8.	Diisi jumlah uang jaminan lelang	
9.	Diisi Penerimaan lain-lain apabila ada misalnya uang jaminan lelang dari pembeli yang Wanprestasi	
10.	Diisi jumlah penerimaan kolom 5, 6,7, 8,9	
11.	Diisi nomor urut	
12.	Diisi nomor dan tanggal Risalah Lelang	
13.	Diisi uraian pengeluaran	
14.	Diisi jumlah hasil lelang yang telah diserahkan kepada pemilik barang	
15.	Diisi tanggal dan nomor bukti penyetoran hasil lelang	
16.	Diisi jumlah bagian hasil lelang yang disetor untuk pembayaran PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	
17.	Diisi tanggal dan nomor bukti penyetoran PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	
18.	Diisi jumlah Bea Lelang yang disetor	
19.	Diisi tanggal dan nomor bukti penyetoran Bea Lelang	
20.	Diisi jumlah uang jaminan lelang	
21.	Diisi tanggal dan nomor bukti penyetoran uang jaminan	
22.	Diisi penyetoran lain-lain apabila ada misalnya uang jaminan lelang dari pembeli yang Wanprestasi	
23.	Diisi jumlah pengeluaran kolom 14,16,18,20,22	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN TU. DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG
BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh Laporan Bulanan Realisasi Pelaksanaan Lelang

LAPORAN BULANAN REALISASI PELAKSANAAN LELANG

PT BALAI LELANG ...

Bulan ... Tahun ...

No.	Risalah Lelang		Pejabat	Hasil Lelang		Bea Lelang		PPh		BPHTB		Keterangan
	tanggal	Nomor	Lelang/KPKNL	(Rp)	Tgl Setor	(Rp)	Tgl Setor	(Rp)	Tgl Setor	(Rp)	Tgl Setor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

LAPORAN BULANAN REALISASI PELAKSANAAN LELANG

Laporan Realisasi Pelaksanaan Lelang merupakan laporan kegiatan pelaksanaan lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang setiap bulan.

CARA PENGISIAN:

Judul diisi Laporan Realisasi Penyelenggaraan Lelang Balai Lelang yang bersangkutan dan Bulan dan Tahun laporan dibuat.

Kolom	Cara Pengisian	Keterangan
1	2	3
1.	Diisi nomor urut	
2.	Diisi tanggal Risalah Lelang	
3.	Diisi Nomor Risalah Lelang	
4.	Diisi Pejabat Lelang dan KPKNL tempat kedudukan Pejabat Lelang	
5.	Diisi jumlah hasil lelang	
6.	Diisi tanggal penyetoran hasil lelang	
7.	Diisi jumlah Bea Lelang	
8.	Diisi tanggal penyetoran Bea Lelang	
9.	Diisi jumlah PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	
10.	Diisi tanggal penyetoran PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	
11.	Diisi jumlah BPHTB	
12.	Diisi tanggal penyetoran BPHTB	
13.	Diisi lelang laku, tidak ada penawar, batal atau ditahan	

Catatan :

1. Pengisian Kolom 5,6,7,8,9,10,11 dan 12 dilampiri dengan Fotokopi kwitansi Hasil Lelang kepada pemilik barang, SSBP dan SSP (PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan dan BPHTB);
2. Dalam hal yang dilelang tanah atau bangunan, BPHTB dikenakan berdasarkan UU No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN TU/ DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BIRO UMUM
SEKRETARIAT JENDERAL

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG
BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh Laporan Bulanan Kas/Bank

LAPORAN KAS BULANAN

Bulan_____

1	Saldo Awal	Rp
2	Penerimaan	
		Rp
3	TOTAL PENERIMAAN	Rp
4	Pengeluaran	
		Rp
5	TOTAL PENGELUARAN	Rp
6	Saldo Akhir	Rp

tanggal

_____

Direksi Balai Lelang

CARA PENGISIAN

1. diisi dengan saldo kas awal sesuai dengan saldo awal bulan buku kas.
2. diisi dengan penerimaan kas yang terjadi selama bulan yang dilaporkan, dapat dikelompokkan dalam kelompok-kelompok penerimaan.
3. diisi dengan menjumlahkan 2.
4. diisi dengan pengeluaran kas yang terjadi selama bulan yang dilaporkan, dapat dikelompokkan dalam kelompok-kelompok pengeluaran.
5. diisi dengan menjumlahkan 4.
6. diisi dengan menjumlah 1 dan 3 dan mengurangi dengan 5.

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN BANK BULANAN

Bank _____ No.Rek_____

Bulan_____

1	Saldo Awal	Rp
2	Penerimaan	Rp
3	TOTAL PENERIMAAN	Rp
4	Pengeluaran	Rp
5	TOTAL PENGELUARAN	Rp
6	Saldo Akhir	Rp

tanggal

_____

Direksi Balai Lelang

CARA PENGISIAN

1. diisi dengan saldo bank awal sesuai dengan saldo awal bulan buku bank.
2. diisi dengan penerimaan bank yang terjadi selama bulan yang dilaporkan, dapat dikelompokkan dalam kelompok-kelompok penerimaan.
3. diisi dengan menjumlahkan 2.
4. diisi dengan pengeluaran bank yang terjadi selama bulan yang dilaporkan, dapat dikelompokkan dalam kelompok-kelompok pengeluaran.
5. diisi dengan menjumlahkan 4.
6. diisi dengan menjumlah 1 dan 3 dan mengurangi dengan 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG
BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh Laporan Realisasi Pelaksanaan Jasa Pralelang dan Pascalelang

---

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN JASA PRALELANG DAN PASCALELANG

PT BALAI LELANG ...

Bulan ... Tahun ...

No.	Lelang		Pemohon	Jenis Lelang	Pelaksana Lelang	Barang yang Dilelang	
	Tanggal	Tempat				Jenis	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN JASA PRALELANG DAN PASCA LELANG

Laporan Realisasi Pelaksanaan Jasa Pralelang dan Pascalelang merupakan buku yang berisi catatan kegiatan pralelang dan pascalelang yang diselenggaralan oleh Balai Lelang setiap bulan.

CARA PENGISIAN :

Judul diisi Laporan Realisasi Pelaksanaan Jasa Pralelang dan Jasa Pascalelang yang bersangkutan serta Bulan dan Tahun laporan dibuat.

Kolom	Cara Pengisian	Keterangan
1	*2*	*3*
1.	Diisi nomor urut	
2.	Diisi tanggal pelaksanaan lelang	
3.	Diisi tempat pelaksanaan lelang	
4.	Diisi pemohon lelang	
5.	Diisi jenis lelang	
6.	Diisi nama KPKNL/Pejabat Lelang pelaksana lelang	
7.	Diisi jenis barang yang dilelang	
8.	Diisi jumlah barang yang dilelang	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN T.U. DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 176 /PMK.06/2010 TENTANG
BALAI LELANG

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Contoh Laporan Kegiatan Tahunan

LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN

PT BALAI LELANG ...

Bulan ... Tahun ...

No.	Risalah Lelang		Pejabat Lelang /KPKNL	Harga Lelang		Hasil Bersih lelang		Bea Lelang		PPh		BPHTB		Keterangan
	Tanggal	Nomor		(Rp)	Tgl Setor	(Rp)	Tgl Setor	(Rp)	Tgl Setor	(Rp)	Tgl Setor	(Rp)	Tgl Setor	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

LAPORAN KEGIATAN TAHUNAN

Laporan Kegiatan Tahunan Balai Lelang merupakan laporan hasil penyelenggaraan lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang selama 1 (satu) tahun.

CARA PENGISIAN

Judul diisi Laporan Kegiatan Tahunan Balai Lelang yang bersangkutan dan Tahun laporan dibuat.

Kolom	Cara Pengisian	Keterangan
1	2	3
1.	Diisi nomor urut	
2.	Diisi tanggal Risalah Lelang	
3.	Diisi Nomor Risalah Lelang	
4.	Diisi nama Pejabat Lelang dan KPKNL tempat kedudukan Pejabat Lelang	
5.	Diisi jumlah harga lelang	
6.	Diisi tanggal setor harga lelang dari pembeli	
7.	Diisi jumlah hasil lelang	
8.	Diisi tanggal setor hasil lelang ke pemilik barang	
9.	Diisi jumlah Bea Lelang	
10.	Diisi tanggal setor Bea Lelang	
11.	Diisi Jumlah PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	
12.	Diisi tanggal setor PPh atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan	
13.	Diisi jumlah BPHTB	
14.	Diisi tanggal setor BPHTB	
15.	Diisi Keterangan lain-lain/tambahan bila ada	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM
u.b.
KEPALA BAGIAN TU. DEPARTEMEN

GIARTO
NIP195904201984021001

MENTERI KEUANGAN

ttd.

AGUS D.W. MARTOWARDOJO